



## Investigasi atas revaluasi aset, penyajian laporan keuangan, dan kualitas auditor berbasis mandatory *IFRS*

Nurmala Ahmar <sup>a</sup>

<sup>a</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya, [nurmala@perbanas.ac.id](mailto:nurmala@perbanas.ac.id)

### INFO ARTIKEL

**Riwayat Artikel:**

Artikel dikirim 09-03-2017

Revisi 08-05-2017

Artikel diterima 05-04-2018

**Keywords:**

asset revaluation, auditor quality, report presentation, IFRS adoption

**Kata Kunci:**

asset revaluation, auditor quality, report presentation, IFRS adoption

### ABSTRACT

*Revaluation of asset is not carried out by the company in Indonesia today. This prompted Finance Minister Regulation Number 191/PMK.010/2015 on revaluation for tax purposes. Revaluation of assets in general purpose is to increase the firm's value and presents an account at the real values. This research investigating the activity of asset revaluation carried out by a public company in Indonesia based on auditor quality and monetary unit of financial statement presentation. This research investigate 434 firms during the years 2012 to 2014. The results showed that 7.1 percent of the firms revaluation of assets and 92.9 percent have not been revalued their assets. Firms that revalued their assets, 3 percent of them audited public accountant firms affiliated with the Big 4 and 4.1 percent of them did not. The number of issuers that revalue assets and presents its financial statements in the rupiah currency as much as 5.3 percent and 1.8 percent in US dollars.*

### ABSTRAK

Revaluasi aset belum banyak dilakukan oleh perusahaan di Indonesia sehingga mendorong lahirnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 191/PMK.010/2015 tentang penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan. Tujuan revaluasi aset pada umumnya adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan dan menyajikan akun pada nilai yang sebenarnya. Riset ini melakukan investigasi aktivitas revaluasi aset yang dilakukan oleh perusahaan publik di Indonesia berdasarkan kualitas auditornya dan satuan moneter penyajian laporan keuangan. Riset menginvestigasi 434 emiten selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 7,1 persen emiten melakukan revaluasi aset dan 92,9 persen emiten belum melakukan revaluasi aset. Dari jumlah tersebut 3 persen diaudit oleh KAP (Kantor Akuntan Publik) yang berafiliasi dengan *big four* dan 4,1 persennya tidak. Jumlah emiten yang merevaluasi aset dan menyajikan laporan keuangannya dalam mata uang rupiah sebanyak 5,3 persen dan dalam US dollar 1,8 persen.

## PENDAHULUAN

Pemerintah mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi V pada tanggal 22 Oktober 2015 mencakup tiga deregulasi kebijakan yang mencakup revaluasi aset, menghilangkan pajak berganda dana investasi *real estate*, properti dan infrastruktur serta, deregulasi di bidang perbankan syariah. Kebijakan ini dikeluarkan karena masih banyak perusahaan yang belum melakukan revaluasi aset dengan adanya perubahan nilai aktiva, baik akibat inflasi maupun depresiasi rupiah, juga dipandang perlu adanya dukungan pemerintah untuk meningkatkan performa finansial perusahaan melalui revaluasi aset. Alasan pemerintah terkait belum banyak perusahaan melakukan revaluasi aset memerlukan bukti empiris. Riset ini melakukan investigasi terkait revaluasi aset yang dilakukan perusahaan publik selain lembaga keuangan dan perbankan di Indonesia selama tahun 2012-2015. Hal ini penting sebagai informasi awal terkait implementasi revaluasi aset pasca implementasi *International Financial Reporting Standards (IFRS)* karena standar akuntansi keuangan di Indonesia terkait revaluasi aset diadopsi dari *International Accounting Standard (IAS) 16*. Standar tersebut mengatur cara penilaian, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan terkait revaluasi aset.

Peraturan penilaian kembali aset tetap diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 191/PMK.010/2015 tentang penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan bagi permohonan yang diajukan pada tahun 2015 dan tahun 2016. PMK tersebut efektif berlaku mulai tanggal 20 Oktober 2015. Jika dibandingkan ketentuan yang telah ada sebelumnya, PMK ini menawarkan insentif yang lebih menarik dari sisi besaran tarif pajak dan mekanisme pengajuannya. Wajib pajak dapat melakukan revaluasi aset untuk tujuan perpajakan dengan mendapatkan perlakuan khusus apabila permohonannya diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak sejak peraturan tersebut mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.

Perlakuan khusus akan diberikan kepada wajib pajak berupa pengenaan PPh final sebesar: (a) 3 persen, untuk permohonan yang diajukan sejak 20 Oktober 2015 s.d. 31 Desember 2015; (b) 4 persen, untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Januari 2016 s.d. 30 Juni 2016; atau (c) 6 persen, untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Juli 2016 s.d. 31 Desember 2016. Tarif tersebut dikenakan terhadap selisih lebih nilai aktiva tetap hasil penilaian kembali atau hasil perkiraan penilaian kembali oleh wajib pajak di atas nilai sisa buku fiskal semula. Berdasarkan ketentuan tersebut, perlu dilakukan investigasi lebih lanjut pada penyajian laporan keuangan tahun 2015 dan 2016. Riset ini merupakan pondasi bukti empiris untuk riset selanjutnya terkait revaluasi aset pasca implementasi *IFRS* dan PMK nomor 191/PMK.010/2015.

Perusahaan melakukan revaluasi aset dimotivasi oleh beberapa alasan.

Beberapa alasan dilakukannya revaluasi aset adalah (a) meningkatkan nilai buku aset perusahaan, di sisi lain struktur modal perusahaan juga akan meningkat sehingga memudahkan perusahaan dalam menghimpun dana dari luar, baik melalui pinjaman maupun penjualan saham; (b) meningkatkan keakuratan penghitungan penghasilan maupun biaya sehingga lebih mencerminkan kinerja perusahaan yang sebenarnya dalam menghasilkan laba; dan (c) agar neraca perusahaan menunjukkan posisi kekayaan perusahaan yang sebenarnya.

Terdapat dua konsekuensi penting terkait revaluasi aset perusahaan. Pertama terkait dengan jasa penilai, dan kedua terkait dengan jasa audit. Pada beberapa penelitian kualitas laporan keuangan perusahaan dipengaruhi oleh kualitas kantor akuntan publik (Santoso, 2012). Kualitas Kantor Akuntan Publik (KAP) seringkali diukur dengan afiliasi dengan kantor akuntan asing yang masuk klasifikasi *big four*. Klasifikasi tersebut didasarkan pada antara lain dari jumlah pendapatan, jumlah karyawan, jenis jasa yang diberikan dan reputasi KAP. KAP yang berafiliasi dengan *big four*. KAP internasional sangat berhati-hati menyusun jejaringnya, terutama untuk mengisolasi kasus litigasi (apabila terjadi), sehingga tidak ada satupun KAP *big four* atau KAP internasional lainnya merupakan *partnership* tunggal. Mereka membentuk jejaring (*network*) yang dikoordinasikan oleh suatu *nonprofit entity*. Kerja sama ini meliputi *brand image*, *quality control*, *knowledge management training*, *global staff mobility* dan lain-lainnya. Bentuk kerja sama lainnya adalah dalam bentuk asosiasi, yang disebut *Association of Independent Accounting Firm (AIF)*, yaitu masing masing KAP yang menjadi anggota dapat memilih sendiri manfaat apa yang diinginkan. Kerja sama internasional ini bagi KAP Indonesia dapat berpengaruh langsung kepada kualitas audit karena adanya *transfer of knowledge* atau hanya merupakan *brand strategy* saja. Ukuran KAP, jenis klien dan jenis hubungan internasionalnya akan membentuk karakteristik lingkungan kerja untuk masing-masing kelompok KAP, yang akan berperan dan berpengaruh pada kualitas audit (Bawono & Singgih, 2010). Oleh karenanya KAP yang berafiliasi dengan *big four* diasumsikan memiliki kualitas lebih baik dibandingkan yang tidak. Kualitas auditor tersebut diduga mampu mempengaruhi sikap emiten dalam mengambil kebijakan untuk melakukan dan atau tidak melakukan revaluasi aset.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 52 mengatur syarat penyajian laporan keuangan dapat disajikan berdasarkan mata uang fungsionalnya, yaitu mata uang rupiah (*IDR*) dan mata uang asing (dalam hal ini adalah *USD*). Salah satu syarat penting dalam penyajian mata uang fungsional adalah indikator arus kas, harga jual dan biaya aktivitas operasional, paling tidak 50 persen dalam mata uang asing. Indikator tersebut mencerminkan bahwa penyajian laporan keuangan dalam mata uang asing dapat dipastikan bahwa aktivitas operasionalnya antar negara. Dengan

kata lain informasi akuntansi dikonsumsi oleh pengguna laporan keuangan yang lebih luas. Penyajian dengan nilai wajar aset diduga merupakan pertimbangan penting karena aset yang semakin tinggi secara logis berdampak pada kepercayaan yang tinggi bagi pengguna laporan keuangan. Salah satu akun yang dapat dinilai dengan nilai wajar adalah aset. Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang asing diduga akan lebih melakukan revaluasi aset. Hal yang sama ditemukan oleh Putra (2013) pada studi kasus di satu perusahaan di Makassar. Sementara, determinan dan dampak atas kebijakan revaluasi aset telah dibuktikan oleh beberapa hasil riset.

Kontroversi terhadap penilaian kembali aset telah diperdebatkan sejak lama. Mathews (1968) berargumen bahwa perubahan nilai uang seharusnya seiring dengan perubahan nilai aset, terutama untuk aset tetap. Negara Inggris telah mengimplementasikan *Current Cost Accounting (CCA)* sejak tahun 1983. Hutang berkorelasi positif dengan revaluasi dan berkorelasi negatif dengan pengungkapan nilai sekarang. Pengungkapan *CCA* berkorelasi positif dengan profitabilitas dan intensitas aset tetap, namun tidak berkorelasi dengan revaluasi aset (Lin & Peasnell, 2000). Hal yang senada ditemukan oleh Lopes dan Walker (2012), revaluasi aset berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan mendatang, harga saham, dan *return* saham. Keputusan untuk melakukan revaluasi aset ditemukan berpengaruh negatif terhadap indeks tata kelola perusahaan di Brasil selama tahun 1998-2004 dan berkorelasi negatif dengan utang. Temuan tersebut menunjukkan bahwa revaluasi aset hanya dilakukan untuk meningkatkan ekuitas perusahaan, hal ini menunjukkan adanya motivasi oportunistik manajemen dalam melakukan revaluasi aset. Goodwin, Sawyer, dan Ahmed (2005) menguji relevansi nilai yang diakui dan diungkapkan atas penilaian tanah dan bangunan untuk sampel besar perusahaan-perusahaan Australia dari 1993 sampai 1997. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini mengendalikan risiko dan efek siklis dan menemukan tidak ada perbedaan antara pengakuan dan pengungkapan revaluasi. Riset juga menemukan bukti lemah adanya relevansi nilai atas revaluasi aset baik tanah maupun gedung. Bahkan, Nadeak (2011) dan Dillon (1979) menyatakan bahwa penilaian kembali revaluasi aset berdampak pada penurunan laba. Hal ini disebabkan karena terjadi peningkatan beban depresiasi. Dampak revaluasi juga menurunkan pajak penghasilan perusahaan karena laba yang semakin kecil. Riset pada 76 perusahaan di Bursa Efek Indonesia memberikan bukti bahwa tidak ada perbedaan kualitas informasi akuntansi dan nilai relevansi sebelum dibandingkan sesudah implementasi *IFRS*. Periode riset adalah 2010-2013. Sayangnya, pada penelitian tersebut belum memasukkan unsur revaluasi aset dalam menilai kualitas informasi akuntansi.

Negara Skotlandia memberlakukan revaluasi aset pada industri jasa kesehatan dilakukan sejak tahun 1989. Pemberlakuan tersebut pada sistem akuntansi industri

tersebut dengan pertimbangan untuk menciptakan sistem manajemen yang dinamis dan untuk memfasilitasi manajer untuk mengetahui kemungkinan biaya atas aset yang mereka miliki, aset usang dan mendorong modernisasi fasilitas dan peralatan medis (Andrew & Pitt, 2006). Brown dan Cliff (2005) menemukan hubungan antara revaluasi aset dan sentimen investor menjadi perdebatan di kalangan profesional. Jika optimisme yang berlebihan mendorong harga di atas nilai-nilai intrinsiknya, periode sentimen tinggi harus diikuti dengan return rendah, karena harga pasar kembali ke nilai-nilai fundamental. Riset tersebut dilakukan menggunakan data survei sentimen investor dan ditemukan bahwa sentimen investor mempengaruhi penilaian aset. Kesalahan harga pasar tersirat oleh model penilaian independen berhubungan positif dengan sentimen. Keuntungan masa mendatang selama multi-tahun berhubungan negatif dengan sentimen. Hasil ini dapat diperkuat dengan memasukkan variabel-variabel lain yang mampu mempengaruhi *return* saham. Hasil tersebut mendukung temuan Sloan (1996), Lopes dan Walker (2012) serta Andison dan Nasser (2017).

Cheng dan Lin (2009) membuktikan bahwa perusahaan dengan tingkat resiko yang tinggi cenderung menaikkan aset saat revaluasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan memilih untuk tidak mengakui berita baik kecuali kalau didukung oleh kinerja pasar yg tinggi dan standar industri. Yunani mengadopsi *IFRS* sejak tahun 2005 secara wajib. Dampak implementasi *IFRS* membuktikan semakin rendahnya perilaku manajemen laba, informasi akuntansi memiliki nilai relevansi yang lebih tinggi, dan waktu pengakuan kerugian menjadi lebih tepat. Riset dilakukan pada tahun 2001 sampai dengan 2008 dan berhasil membuktikan bahwa ketika dimasukkan variabel kontrol (ukuran, resiko, profitabilitas, pertumbuhan) dalam model, hasil penelitian tidak berubah (Dimitropoulos, Asteriou, Kousenidis, & Leventis, 2013).

Tahun 2015 memiliki peristiwa penting terkait revaluasi aset. Paket Kebijakan Ekonomi V Presiden Joko Widodo terkait revaluasi aset diharapkan menjadi momentum penting pergerakan emiten untuk melakukan revaluasi aset. Berdasarkan investigasi penelitian ini, meskipun *IFRS* telah memperkenankan dilakukan penilaian kembali aset, namun secara rata-rata hanya ditemukan tidak lebih dari 10 persen emiten melakukan revaluasi aset.

Penelitian ini merupakan riset deskriptif kuantitatif yang menguji bagaimana aktivitas revaluasi aset emiten-emiten yang melaporkan *Other Comprehensive Income (OCI)*. Alasan pemilihan keberadaan pelaporan *OCI* adalah karena aktivitas revaluasi aset merupakan bagian dari aktivitas tersebut. Sampel adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari industri nonlembaga keuangan dan perbankan. Hal ini dilakukan karena industri tersebut telah terlebih dahulu mengimplementasi *IFRS* di tahun 2010 secara *mandatory*. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan

kontribusi dan pijakan riset penting bagi peneliti, selanjutnya terkait revaluasi aset, khususnya pasca implementasi *IFRS* secara *mandatory*.

## **KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

### **Penilaian dan Penyajian Aset**

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 16 (PSAK 16) mendefinisikan aset berwujud adalah aset yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Aset tetap yang dimiliki perusahaan biasanya memiliki nilai yang cukup material dibandingkan dengan total aset yang dimiliki perusahaan tersebut. Karena itu, metode penilaian dan penyajian aktiva tetap sebuah perusahaan akan berpengaruh terhadap laporan keuangan perusahaan bersangkutan.

Berkaitan dengan penilaian dan penyajian aktiva tetap, *IFRS* mengizinkan salah satu dari dua metode yang dapat digunakan, berbasis harga perolehan (biaya) dan berbasis revaluasi (nilai pasar). Penyajian berbasis harga adalah metode penilaian aset yang didasarkan pada jumlah pengorbanan ekonomis yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh aset tetap tertentu sampai aset tetap tersebut siap digunakan. Itu berarti nilai aset yang disajikan dalam laporan keuangan adalah jumlah rupiah historis pada saat memperoleh aset tetap tersebut dikurangi dengan akumulasi penyusutan (jika ada).

Penyajian berbasis revaluasi (nilai pasar) adalah metode penilaian aset yang didasarkan pada harga pasar ketika laporan keuangan disajikan. Penggunaan metode ini akan memberikan gambaran yang lebih akurat tentang nilai aset yang dimiliki perusahaan pada suatu waktu tertentu. Karena nilai suatu aktiva tetap tertentu sering kali sudah tidak relevan lagi dengan kondisi ketika laporan keuangan disajikan oleh perusahaan. Sebagai contoh, sebidang tanah yang dibeli perusahaan 10 tahun yang lalu harganya pasti sudah berlipat-lipat ganda pada saat ini. Jika tanah tersebut disajikan dengan menggunakan biaya historis, maka dianggap tidak mencerminkan lagi kondisi aktual aktiva tetap perusahaan ketika laporan keuangan.

### **Revaluasi Aset Tetap Berwujud.**

*IFRS* memberi ruang terhadap pelaporan menggunakan *fair value* terhadap pengukuran aset tetap berwujud. Dalam penentuan nilai wajar menggunakan beberapa pendekatan, sebagai contoh dalam nilai wajar pabrik dan peralatannya biasanya menggunakan nilai pasar yang ditentukan oleh penilai (*appraisal*), sedangkan untuk nilai wajar tanah dan bangunan ditentukan juga oleh penilai profesional. Penilaian

yang dilakukan oleh penilai profesional seringkali muncul kenaikan ataupun penurunan dari nilai aset tetap berwujud tersebut. Atas kenaikan dan penurunan tersebut yang merupakan nilai revaluasi dapat dicatat dalam pendapatan komprehensif lain.

Pengukuran terhadap aset tetap berwujud pun bisa saja tidak dapat dinilai dikarenakan sifat aset yang khusus atau jarang diperjualbelikan. Apabila hal tersebut terjadi maka perusahaan dapat melakukan pendekatan dengan cara pendekatan penghasilan dan pendekatan biaya pengganti setelah disusutkan. Revaluasi model menurut PSAK 16 adalah jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi maka kenaikan tersebut diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Apabila kenaikan diakui dalam laba rugi sebesar penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah akibat sebelumnya dalam laba rugi. Jika jumlah tercatat aset menurun akibat revaluasi maka penurunan tersebut diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Penurunan diakui dalam pendapatan komprehensif lain sepanjang tidak melebihi saldo surplus aset tersebut. Penurunan nilai yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain mengurangi jumlah akumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Surplus revaluasi yang disajikan pada ekuitas dapat dipindahkan langsung ke saldo laba pada saat aset tersebut digunakan penghentiannya sebesar perbedaan penyusutan dengan revaluasian dan penyusutan dengan biaya perolehan (atau nilai surplus revaluasi dibagi sisa manfaat ekonomi).

*Assets revaluation* mengacu pada peninjauan kembali atas nilai aset serta menyesuaikan nilai buku aset dengan nilainya sekarang (Brown, Izan, & Loh, 1992). Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui dalam pendapatan komprehensif lainnya dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Namun, kenaikan tersebut diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laba rugi. Jika jumlah tercatat aset turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui dalam laba rugi. Penurunan tersebut diakui dalam pendapatan komprehensif lain sepanjang tidak melebihi saldo surplus revaluasi untuk aset tersebut. Penurunan nilai yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain tersebut mengurangi jumlah akumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi.

Alasan yang mendasari keputusan revaluasi aset ini oleh perusahaan adalah untuk memastikan bahwa nilai wajar dari aset tetap perusahaan tercermin dalam laporan keuangan. Revaluasi aset mengacu pada penyajian kembali atas nilai buku aset (*carrying amount*) sehingga mendekati nilainya sekarang (Brown *et al.*, 1992). Revaluasi aset mempengaruhi laporan keuangan dalam dua cara. Pertama, mengubah jumlah aset yang ditampilkan pada laporan posisi keuangan dan angka dalam ekuitas. Kedua, revaluasi mengubah keuntungan saat ini dan masa yang akan datang yang

disebabkan oleh perubahan depresiasi dari aset yang direvaluasi (Lin & Peasnell, 2000). Revaluasi aset tetap dapat berupa *upward revaluation* dan *downward revaluation*. *Upward revaluation* adalah penyajian kembali nilai buku aset sejauh hal tersebut tidak melebihi *net current value* atau *recoverable value*. *Upward revaluation* mengacu pada *incremental value* dari nilai buku aset, sedangkan *downward revaluation* berarti bahwa *net current value* di bawah nilai bukunya. *Upward revaluation* aset tetap meningkatkan nilai ekuitas pemegang saham dan nilai aset tetap. *Upward revaluation* juga dapat menurunkan rasio *financial-leverage* seperti *rasio debt-equity* (Tay, 2009).

### **Penyajian Laporan: Mata Uang Pelaporan**

Mata uang fungsional adalah mata uang yang menjalankan fungsi utama dalam proses penerimaan dan pengeluaran kas entitas. Faktor primer yang dijadikan dasar penetapan menurut PSAK 10 adalah (a) mata uang tersebut digunakan dalam proses menghasilkan pendapatan (barang / jasa) sampai diterimanya pembayaran; (b) mata uang tersebut dimiliki oleh negara yang memiliki pengaruh dalam penentuan harga jual barang / jasa entitas; (c) mata uang tersebut berperan dalam proses *value chain* entitas (misalnya: biaya produksi, dan biaya pendukung).

Mata uang fungsional bukan merupakan mata uang pelaporan. Pelaporan untuk *foreign currency* pada akhir periode pelaporan adalah (a) pos moneter dijabarkan menggunakan kurs penutup; (b) pos nonmoneter yang diukur dalam biaya historis dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi; (c) pos nonmoneter yang diukur pada nilai wajar dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan.

Akuntansi untuk transaksi mata uang asing, penjabaran hasil posisi keuangan kegiatan usaha luar negeri, dan penjabaran hasil posisi keuangan ke suatu mata uang pelaporan, tidak berlaku untuk (a) transaksi derivatif, apabila sudah diatur oleh PSAK 55; (b) akuntansi lindung nilai; (c) penyajian laporan arus kas.

### **Kualitas Auditor**

Kualitas audit mencerminkan kinerja auditor dan dipengaruhi oleh dua hal yaitu kompetensi dan independensi. Kompetensi berkaitan dengan pendidikan dan pengalaman memadai yang dimiliki akuntan publik dalam bidang auditing dan akuntansi. Sedangkan independensi merupakan salah satu komponen etika yang harus dijaga oleh akuntan publik. Hasil penelitian juga memberikan kesimpulan bahwa independensi terkait dengan kualitas mutu pribadi auditor, bukan KAP sebagai suatu organisasi. Independensi melekat pada diri pribadi auditor. Pengaruh budaya masyarakat atau organisasi terhadap auditor akan mempengaruhi sikap independensinya. Kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam

menghadapi situasi dan keadaan di dalam pekerjaannya. Kompetensi seseorang dapat dilihat dari tingkat kreativitas yang dimilikinya serta inovasi-inovasi yang diciptakan dan kemampuannya dalam menyelesaikan suatu masalah. Pada konteks penilaian aset, kompetensi auditor mencakup kemampuan melakukan kontrol yang relevan terkait penentuan kelengkapan, relevansi, dan akurasi data yang digunakan untuk mengembangkan estimasi akuntansi, khususnya asset (Rupić & Bonić, 2015).

Independensi merupakan pengaplikasian tindakan dalam bentuk perbuatan atau mental dari seorang auditor ketika melaksanakan tugas audit agar bertindak tegas dan tidak memihak kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil laporan keuangan yang telah audit. Independen berarti akuntan publik tidak mudah dipengaruhi (Arumsari & Budiarta, 2016). Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), independensi ditekankan dalam Standar Umum kedua yaitu “Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.” Dalam hal ini auditor harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan kepentingan pribadi, pihak eksternal, dan pihak organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya.

Kualitas auditor pada beberapa pendekatan diukur dari afiliasi dengan *big four* dan *non-big four*.

**Tabel 1**  
**Afiliasi Big Four Region Indonesia**

| No | Big-4                    | Big-4 Indonesia                           |
|----|--------------------------|---|
| 1  | Deloitte Touche Tohmatsu | KAP Osman Bing Satrio & Eny               |
| 2  | PwC                      | KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan |
| 3  | Ernst & Young            | KAP Purwantono, Sungkoro & Surja          |
| 4  | KPMG                     | KAP Sidharta Widjaja & Rekan              |

## METODA PENELITIAN

Desain riset merupakan riset deskriptif kuantitatif. Sampel yang diuji sebanyak 434 data tahun perusahaan yang memiliki komponen *OCI*, 130 perusahaan pada tahun 2012 dengan sejumlah 158 dan 146 untuk tahun 2013 dan 2014. Sampel dipilih dengan kriteria memiliki komponen *OCI*. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa pemberlakuan *IFRS* secara *mandatory* memberikan dampak penyajian penghasilan komprehensif lain, termasuk revaluasi aset. Sumber data berasal dari laporan keuangan tahunan yang diterbitkan di [idx.co.id](http://idx.co.id).

Status revaluasi dilakukan dengan mengidentifikasi implementasi PSAK 16 yang tercantum pada laporan laba rugi yang disajikan dalam *OCI*. Penyajian laporan keuangan dibagi dalam dua penyajian unit moneter, *USD* dan *IDR*. Selama tahun observasi, sejumlah 23,5 persen (102 emiten) menyajikan laporan keuangan dengan

mata uang *USD* dan 76,5 persen (332 emiten) dalam *IDR*. Klasifikasi status revaluasi aset dilakukan dengan mengidentifikasi nilai revaluasi aset yang disajikan pada laporan keuangan. Jika terdapat angka pada item tersebut maka diberikan status melakukan revaluasi, dan sebaliknya jika tidak. Status kualitas audit diklasifikasi berdasarkan afiliasi kantor akuntan publik dengan KAP dengan kategori *bigfour* dan *nonbig four*.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Fokus penelitian ini adalah pemberlakuan implementasi standar akuntansi berbasis *IFRS* per tahun 2012. *IFRS* diadopsi sejak tahun 2008, namun masih belum wajib diterapkan atau seringkali diistilahkan masa konvergensi. Pemberlakuan secara wajib adopsi *IFRS* dimulai tahun 2012 berdasarkan keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep.347/BL/2012 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik. Hal penting terkait dengan penyajian aset adalah revaluasi aset. Beberapa hal penting terkait revaluasi aset yang diatur pada surat keputusan tersebut adalah (a) dalam hal emiten atau perusahaan publik menggunakan model revaluasi untuk aset tetap atau aset tak berwujud, atau model nilai wajar untuk properti investasi, maka emiten atau perusahaan publik wajib menggunakan penilai dalam penentuan nilai wajarnya; (b) penilai yang digunakan adalah yang terdaftar di Bapepam dan LK; (c) frekuensi penilaian yang melibatkan penilai wajib dilakukan dengan keteraturan yang cukup untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal laporan posisi keuangan; (d) aset yang mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan dan fluktuatif wajib direvaluasi secara tahunan; (e) aset yang tidak mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan wajib direvaluasi paling kurang setiap 3 (tiga) tahun.

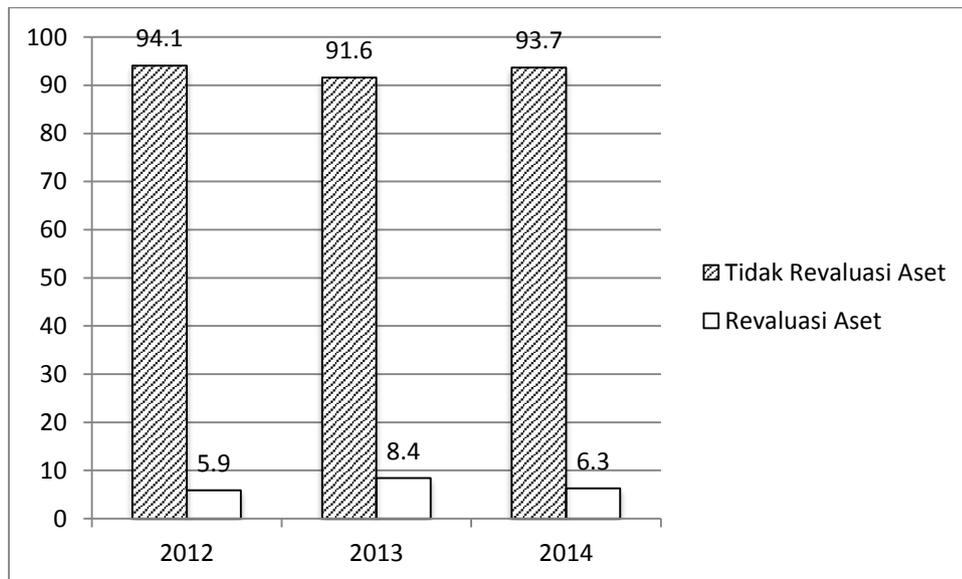
Penilaian, pengukuran, penyajian dan pengungkapan revaluasi aset diatur pada PSAK 16. PSAK 16 lama hanya membolehkan *cost model*, *revaluation model* diperbolehkan sesuai ketentuan pemerintah. PSAK 16 revisi 2011 terdapat 2 pilihan, *cost model* atau *revaluation model*. Berdasarkan regulasi tersebut emiten diperbolehkan melakukan revaluasi aset. Penyempurnaan standar dilakukan tahun 2014 terkait nilai tercatat bruto direvaluasi, maka akumulasi penyusutan revaluasian disajikan kembali secara proporsional dengan perubahan dalam jumlah tercatat bruto. Tahun 2015 disempurnakan dalam hal ketika entitas menggunakan model revaluasi, jumlah tercatat aset disajikan kembali pada jumlah revaluasiannya, sehingga jumlah tercatat aset bruto dan akumulasi penyusutan diperlakukan pada salah satu cara berikut (a) jumlah tercatat bruto disajikan kembali secara konsisten dengan revaluasi jumlah

tercatat tersebut dan akumulasi penyusutannya disesuaikan untuk menyamakan perbedaan antara jumlah tercatat bruto dengan jumlah tercatat setelah memperhitungkan akumulasi rugi penurunan nilai; atau (b) akumulasi penyusutan dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto aset.

Penelitian ini berfokus pada penyajian sebagaimana yang tercantum dalam laporan keuangan emiten. Revaluasi aset diperbolehkan dalam pencatatan, namun masih ada pilihan lain yaitu penilaian berdasarkan harga perolehan. Hasil riset ini merupakan investigasi awal terkait perilaku revaluasi aset pada emiten di Bursa Efek Indonesia. Tahun observasi difokuskan pada tahun 2012 sampai dengan 2014, dengan pertimbangan tahun 2012 merupakan tahun awal implementasi *IFRS* secara wajib. Tahun 2014 merupakan tahun akhir pengamatan dengan pertimbangan ketersediaan informasi sampai dengan 2015. Riset ini memberikan status “1” untuk perusahaan yang melakukan revaluasi dan “0 “. Klasifikasi didasarkan pada tahun, kualifikasi Kantor Akuntan Publik (KAP), dan penyajian mata uang sebagaimana tampak pada Tabel 2 (Lampiran).

**Revaluasi Aset dan Penyajian Tahun Laporan Keuangan**

Jumlah total emiten yang diobservasi selama tahun 2012-2014 (3 tahun) adalah sejumlah 403 data tahun. Terdiri dari 104 data tahun 2014, 109 data 2013, dan 96 data tahun 2012. Data dipilih berdasarkan pada penyajian laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Perkembangan proporsi emiten yang melakukan revaluasi aset dan tidak selama 3 tahun pengamatan tampak pada Gambar 1.



**Gambar 1**  
**Perkembangan Proporsi Emiten Tahun 2012-2014**

Berdasarkan tabel dan gambar perkembangan jumlah emiten yang melakukan revaluasi aset tampak bahwa sangat sedikit emiten yang melakukan revaluasi. Tidak lebih dari 10 persen emiten yang melakukan revaluasi aset selama 3 tahun pemberlakuan *IFRS* dan PSAK 16 terkait pilihan penilaian kembali berdasarkan nilai pasar. Temuan ini menjadi menarik karena menurut Saito (1983), banyak perusahaan termotivasi melakukan revaluasi aset untuk meningkatkan nilai perusahaan, namun hal tersebut tidak terjadi di Indonesia. Brown dan Cliff (2005), serta Lopes dan Walker (2012) membuktikan bahwa revaluasi aset mampu meningkatkan harga saham. Haverty (2006) dan Liu (2011) bahkan membuktikan adanya profitabilitas yang meningkat ketika perusahaan-perusahaan di China yang *listing* di Bursa Efek New York ketika mengadopsi *IFRS* dalam penyajian laporan keuangannya. Iatridis dan Kilirgiotis (2012) membuktikan bahwa perusahaan yang berukuran besar semakin cenderung melakukan revaluasi aset (Demski, Lin, & Sappington, 2008).

Hal menarik yang memerlukan kajian lebih lanjut adalah alasan para emiten tidak tertarik untuk melakukan revaluasi aset, sementara banyak bukti ilmiah menunjukkan bahwa aktivitas penilaian aset dengan nilai wajar memberikan banyak manfaat ekonomis bagi perusahaan. Hal yang dapat kita kaji adalah konsekuensi dari aktivitas revaluasi aset. Sebagaimana regulasi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep.347/BL/2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik adalah bahwa penilaian kembali harus dilakukan oleh pihak penilai independen yang terdaftar di Bapepam-LK. Hal ini tentu membawa konsekuensi biaya. Pilihan melakukan revaluasi harus dilakukan secara berkelanjutan, hal ini berarti bahwa biaya yang melekat terkait aktivitas revaluasi aset merupakan biaya tetap yang harus disediakan perusahaan. Undang-Undang Pajak Penghasilan dalam pasalnya menyebutkan bahwa selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap merupakan objek pajak dengan pajak final sebesar 10% dari selisih revaluasi.

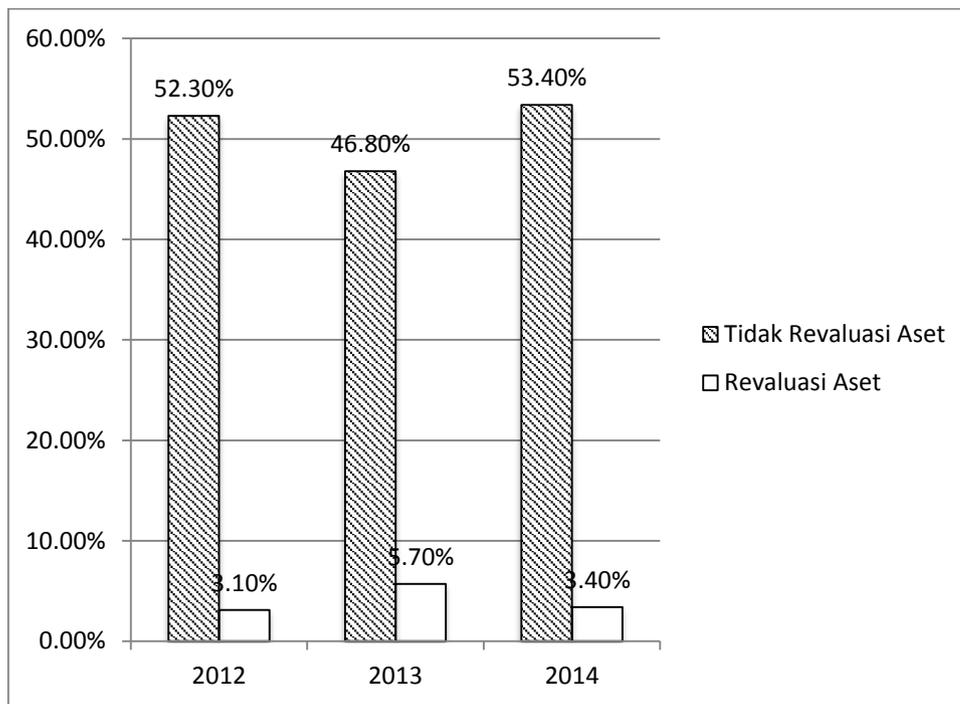
Beberapa ketentuan umum revaluasi menurut aturan perpajakan dapat diringkas sebagai berikut: (a) revaluasi dilakukan atas seluruh aktiva tetap perusahaan termasuk tanah dengan status hak milik atau hak guna bangunan; (b) revaluasi dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai yang memperoleh izin dari Pemerintah. Jika hasil revaluasi tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya dapat ditetapkan oleh DJP; (c) selisih revaluasi dikenakan pajak final sebesar 10 persen; (d) penilaian kembali aktiva tetap tidak dapat dilakukan sebelum lewat jangka waktu lima tahun terhitung dari revaluasi terakhir; (e) hasil revaluasi akan memperbarui nilai tercatat aset dan menjadi dasar penyusutan fiskal; (f) revaluasi yang tidak memperoleh persetujuan DJP untuk penilaian kembali aktiva tetap, maka nilai revaluasi yang

ditetapkan tidak dapat digunakan sebagai dasar melakukan penyusutan fiskal; (g) perusahaan yang menjual aset yang telah direvaluasi sebelum masa penyusutan berakhir (kelompok 1 dan 2) atau sebelum 10 tahun dari tanggal revaluasi (kelompok lainnya), maka akan dikenakan tambahan pajak final sebesar selisih tarif terakhir dikurangi 10 persen ( $25 \text{ persen} - 10 \text{ persen} = 15 \text{ persen}$ ) dikalikan dengan keuntungan revaluasi aset.

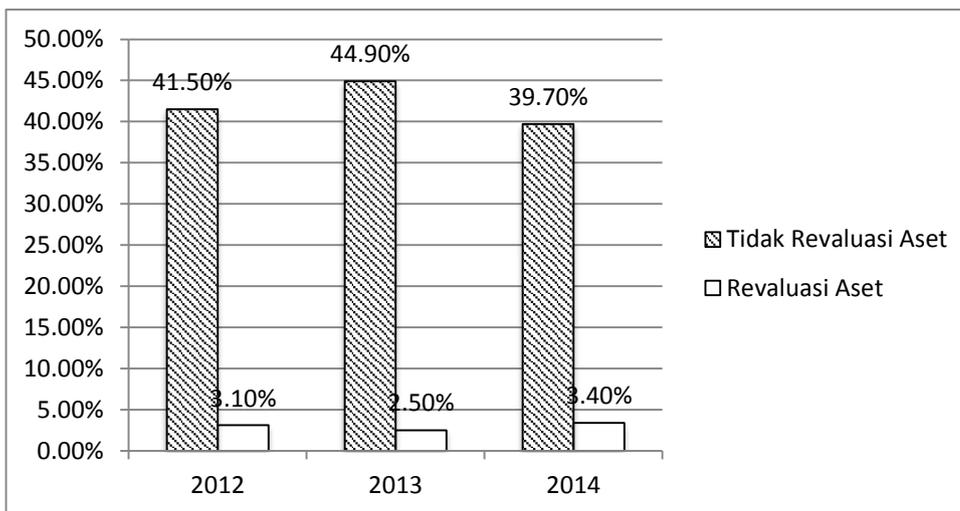
Konsekuensi beban yang ditanggung perusahaan tersebut diduga merupakan penyebab rendahnya jumlah emiten yang melakukan revaluasi aset. Beban untuk jasa penilai, beban pajak yang ditanggung oleh emiten/wajib pajak dirasakan sangat besar, sementara secara riil, peningkatan nilai bukan peningkatan yang sesungguhnya. Cotter dan Richardson (2002) telah menemukan bukti bahwa revaluasi aset *plant, property and equipment* yang dilakukan oleh jasa penilai lebih memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dibandingkan hasil penilaian oleh manajemen. Hanlon, Navissi, dan Soepriyanto (2014) juga memaparkan hasil pengamatan pada perusahaan-perusahaan di Indonesia bahwa munculnya pajak tangguhan merupakan liabilitas riil atas konsekuensi aktivitas revaluasi aset.

### **Revaluasi Aset berdasarkan Kualifikasi Kantor Akuntan Publik**

Kualitas auditor di suatu negara seringkali diukur dengan afiliasi KAP tersebut dengan Kantor Akuntan bereputasi internasional *big four* yaitu Ernst and Young, Deloitte Touche and Tohmatsu, Price Waterhouse Cooper and Lybrant, dan KPMG Peat Marwick Mitchel. Kantor Akuntan Publik yang berafiliasi dengan empat KAP internasional tersebut diasumsikan berkualifikasi baik. Di Indonesia, Price Waterhouse Cooper berafiliasi dengan KAP Tanudiredja, Wibisana dan Rekan. Deloitte Touche berafiliasi dengan KAP Osman Bing Satrio. Ernst and Young berafiliasi dengan KAP Purwantono, Suherman dan Surja. KPMG berafiliasi dengan KAP Sidharta dan Widjaja. Berdasarkan laporan auditan setiap akhir tahun sampel penelitian diidentifikasi nama-nama KAP yang berperan sebagai auditor independen. Jika berafiliasi dengan salah satu *big four* tersebut diberikan skor 1 dan jika tidak 0. Tabulasi silang dilakukan untuk mengetahui komposisi KAP dengan status revaluasi emiten. Rangkuman hasilnya sebagaimana tampak pada Tabel 1. Berikut adalah gambaran status revaluasi berdasarkan kualifikasi auditornya.



**Gambar 2**  
**Status Revaluasi pada KAP Big-4**



**Gambar 3**  
**Status Revaluasi pada KAP Non-Big4**

Berdasarkan gambaran tersebut proporsi sampel yang melakukan revaluasi aset dan diaudit oleh KAP *big four* meningkat dari tahun 2012 ke tahun 2013 dan menurun setelahnya. Berbeda dengan emiten yang diaudit oleh KAP nonbig four yang meningkat pada akhir tahun pengamatan. Yao, Percy, dan Hu (2015) menemukan bukti

empiris bahwa ada peningkatan *fee* audit ketika dilakukan revaluasi aset dibandingkan dengan periode sebelumnya. Penelitian ini tidak melakukan pengamatan apakah terjadi perpindahan. Secara rata-rata jumlah emiten yang diaudit oleh KAP nonbig four secara absolut lebih banyak (18 emiten) dibandingkan KAP big four (13 emiten). *Fee* audit yang meningkat seiring aktivitas revaluasi seharusnya tidak menjadi alasan untuk takut melakukan revaluasi aset karena biaya keagenan yang muncul atas kontrak antara emiten dengan pemeriksanya (auditor) terkait dengan nilai wajar akan saling hapus dengan keuntungan atas nilai wajar tersebut.

### **Revaluasi Aset dan Penyajian Laporan Keuangan berdasarkan Mata Uang**

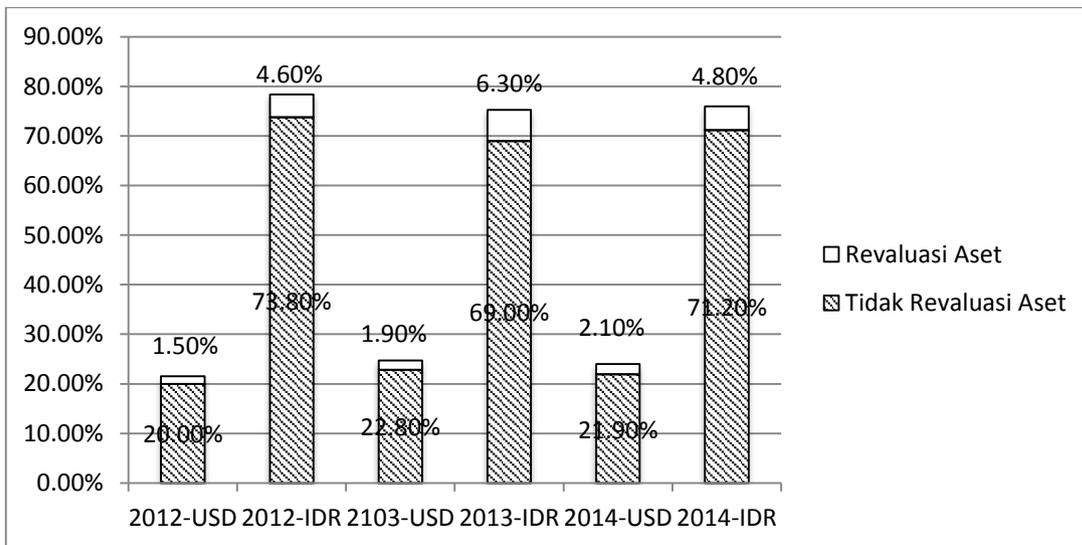
Mata uang penyajian yang digunakan oleh emiten atau perusahaan publik adalah mata uang rupiah yang dapat digunakan apabila mata uang tersebut memenuhi kriteria mata uang fungsional. Dalam hal mata uang penyajian berbeda dari mata uang fungsional, maka emiten atau perusahaan publik menjabarkan hasil dan posisi keuangannya dalam mata uang rupiah dengan menggunakan prosedur sebagai berikut: (a) aset dan liabilitas untuk setiap laporan posisi keuangan yang disajikan (termasuk komparatif) dijabarkan menggunakan kurs penutup yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal laporan posisi keuangan tersebut; (b) penghasilan dan beban untuk setiap laporan laba rugi komprehensif yang disajikan (termasuk komparatif) dijabarkan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal transaksi; dan (c) semua hasil dari selisih kurs diakui dalam pendapatan komprehensif lain.

Hasil investigasi terkait dengan penyajian laporan keuangan dalam mata uang rupiah dan dolar, dapat digambarkan sebagai Gambar 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proposi emiten dalam sampel riset yang melakukan revaluasi aset dan menyajikan laporan keuangannya dalam *USD* meningkat. Secara keseluruhan, jumlah perusahaan yang menyajikan laporan keuangan mata uang asing juga cenderung meningkat. Suatu temuan menarik dalam konteks emiten di Indonesia. Secara regulatif, penyajian laporan keuangan dapat dilakukan apabila memenuhi syarat mata uang fungsional sebagaimana PSAK 52.

Untuk menentukan apakah mata uang tertentu merupakan mata uang yang mendominasi kegiatan operasi suatu badan usaha, maka ada beberapa indikator yang dapat dipakai sesuai PSAK No 52 (1998) mencakup, indikator arus kas, indikator harga jual, dan indikator biaya. Pada indikator arus kas, arus kas yang berhubungan dengan kegiatan utama perusahaan didominasi oleh mata uang tertentu. Indikator harga jual merupakan harga jual produk perusahaan dalam periode jangka pendek yang sangat dipengaruhi oleh pergerakan nilai tukar mata uang tertentu atau produk perusahaan secara dominan dipasarkan untuk ekspor. Indikator biaya mencakup biaya-

biaya perusahaan secara dominan sangat dipengaruhi oleh pergerakan mata uang tertentu.

Penentuan dominasi suatu mata uang setelah melihat ketiga indikator di atas, biasanya menghasilkan persentase di atas 50 persen dan ketiga indikator tersebut harus dapat dipenuhi secara menyeluruh. Berdasarkan regulasi tersebut secara jelas diungkapkan bahwa emiten yang melakukan penyajian laporan keuangan dalam mata uang asing (*USD*) dapat dipastikan aktivitas operasional didominasi transaksi dengan mata uang yang bersangkutan.



**Gambar 4**  
**Revaluasi Aset dalam Penyajian Laporan Keuangan Rupiah dan US-Dollar**

Missonier-Piera (2007) mengungkapkan adanya motif ekonomi dilakukannya revaluasi aset pada perusahaan-perusahaan di Swiss yang melakukan ekspor produk ke luar negeri. Demikian pula dengan He dan Xiong (2012). Motif lain yang diungkapkan oleh riset tersebut adalah keinginan emiten untuk mendapatkan peluang investasi. Hasil riset tersebut membawa implikasi bahwa revaluasi dapat menjadi alat untuk meningkatkan kepercayaan dan persepsi investor dan kreditur atas kesehatan finansial perusahaan sehingga mampu meningkatkan kapasitas perusahaan. Riset juga menemukan, meskipun selama periode investigasi tingkat resiko menurun, tingkat bunga menjadi lebih rendah pada perusahaan yang melakukan revaluasi aset dengan menaikkan nilai asetnya.

Informasi aktivitas revaluasi aset yang disajikan dalam mata uang asing diharapkan memiliki karakteristik kualitatif yang lebih baik (Herrmann, Saudagaran, & Thomas, 2006). Penyajian laporan keuangan dengan nilai wajar atas tanah, properti dan peralatan lebih baik dibandingkan dengan menggunakan nilai perolehan. Nilai

prediksi, nilai umpan balik, ketepatan waktu, kenetralan, penyajian yang dapat dipercaya, dapat diperbandingkan, dan konsisten menjadi keunggulan dipandang dari karakteristik kualitatif laporan keuangan.

Secara keseluruhan, dari 434 data tahun selama 2012 sampai dengan 2014 hanya 7,1 persen (31 emiten) yang melakukan revaluasi aset. Sebanyak 92,9 persen emiten di Bursa Efek Indonesia tidak melakukan revaluasi aset. Pada penyajian mata uang rupiah 23 emiten menyajikan dalam mata uang rupiah, diaudit oleh KAP *big four* sejumlah 7 emiten dan non-Big4 sebanyak 16 emiten. Perusahaan. Pada penyajian laporan keuangan dengan mata uang fungsional USD 8 emiten melakukan revaluasi aset, 6 diantaranya diaudit KAP *big four* dan selebihnya (2 emiten) diaudit non-Big4. Tampak bahwa ketika perusahaan melakukan revaluasi aset dan menyajikan dalam USD cenderung diaudit oleh KAP *big four*.

Menteri Keuangan telah menerbitkan PMK nomor 191/PMK.010/2015 tentang penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan bagi permohonan yang diajukan pada tahun 2015 dan tahun 2016. PMK tersebut efektif berlaku mulai tanggal 20 Oktober 2015. PMK ini menawarkan insentif yang lebih menarik dari sisi besaran tarif pajak dan mekanisme pengajuannya dibandingkan PMK sebelumnya. Wajib pajak dapat melakukan revaluasi aset untuk tujuan perpajakan dengan mendapatkan perlakuan khusus apabila permohonannya diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak sejak peraturan tersebut mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.

Perlakuan khusus akan diberikan kepada wajib pajak berupa pengenaan PPh final sebesar: (a) 3 persen, untuk permohonan yang diajukan sejak 20 Oktober 2015 sampai dengan 31 Desember 2015; (b) 4 persen, untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Januari 2016 sampai dengan 30 Juni 2016; atau (c) 6 persen, untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Desember 2016. Tarif tersebut dikenakan terhadap selisih lebih nilai aktiva tetap hasil penilaian kembali atau hasil perkiraan penilaian kembali oleh wajib pajak di atas nilai sisa buku fiskal semula. Regulasi ini diharapkan dapat menjadi pemicu bagi para emiten untuk melakukan revaluasi aset.

Hasil penelitian ini berdampak penting pada riset terkait revaluasi aset di Indonesia. Jumlah perusahaan yang melakukan revaluasi aset terbukti meningkat. Temuan empiris terkait motivasi melakukan revaluasi aset penting untuk dibuktikan, demikian juga dengan konsekuensi kebijakan revaluasi aset di perusahaan. Wali (2015) membuktikan bahwa perusahaan yang memiliki risiko atas akumulasi utang akan berupaya menghindari kegagalan pembayaran dengan melakukan revaluasi aset. Hal serupa ditemukan oleh Baek dan Lee (2016), perusahaan dengan biaya modal tinggi terbukti lebih banyak melakukan revaluasi aset dibanding perusahaan yang

memiliki biaya modal rendah. Pada konteks lain, perusahaan yang beroperasi di luar negeri dan memiliki aset tetap yang rendah dan hutang yang tinggi juga cenderung melakukan revaluasi aset (Iatridis & Kilirgiotis, 2012).

Temuan pengaruh revaluasi aset terhadap manajemen laba merupakan dampak dari kebijakan revaluasi aset. Iatridis dan Kilirgiotis (2012) membuktikan adanya pengaruh negatif revaluasi aset terhadap manajemen laba, sementara Hu, Percy, dan Yao (2015) menemukan sebaliknya, revaluasi aset meningkatkan nilai akrual diskresioner. Revaluasi aset juga terbukti membawa dampak besar terhadap biaya, Yao *et al.*, (2015) membuktikan adanya peningkatan *audit fee* pada perusahaan-perusahaan yang melakukan revaluasi aset. Pada riset tersebut kebijakan revaluasi aset dapat terjadi jika ada dukungan tata kelola yang baik di perusahaan. Mura, Piras, dan Valentinčič (2015) membuktikan pengaruh revaluasi aset terhadap kinerja perusahaan di masa mendatang dan berkorelasi negatif dengan arus kas mendatang. Hanlon *et al.*, (2014) menyebutkan bahwa dampak revaluasi aset terhadap relevansi nilai perusahaan yang diakibatkan penyajian pajak tangguhan atas revaluasi. Shin dan Willis (2014) menguji motivasi manajer melakukan revaluasi aset dengan *information cost hypothesis* (ICH) dan *the fair value hypothesis* (FVH). ICH diuji dengan melihat dampak pengumuman revaluasi aset, hasilnya adalah terdapat korelasi positif antara pengumuman revaluasi aset dengan imbal hasil saham dengan pada kondisi biaya informasi yang rendah dan tingkat risiko rendah. FVH diuji dengan menguji dampak nilai hutang dalam mata uang asing terhadap imbal hasil saham. Hasil riset membuktikan temuan yang konsisten yaitu terdapat korelasi positif antara hutang dalam mata uang asing dengan imbal hasil saham.

## **SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

Implementasi *IFRS* secara *mandatory* per tahun 2012 memberikan keleluasaan bagi emiten di pasar modal untuk menyajikan aset pada laporan keuangan dengan menggunakan nilai wajar bukan hanya nilai perolehan. Hal ini diharapkan dapat membantu emiten untuk meningkatkan nilai perusahaannya dari pandangan *stakeholder*. Investigasi selama 3 tahun dari 434 data tahun sejak implementasi *IFRS* memberikan hasil yang cukup mengejutkan. Tidak lebih dari 10 persen emiten melaporkan revaluasi aset. Hal ini diduga memicu munculnya Paket Kebijakan Ekonomi V Presiden Joko Widodo terkait revaluasi aset (salah satunya).

Secara empiris aktivitas revaluasi aset terbukti dapat meningkatkan kualitas informasi akuntansi karena mampu mengurangi kecenderungan manajemen laba, meningkatkan relevansi nilai, imbal hasil saham, dan nilai perusahaan. Riset mendatang dapat menguji korelasi antara variable-variabel tersebut dengan revaluasi.

Hal terpenting sebagai tindak lanjut penelitian ini adalah apakah Paket Kebijakan Ekonomi V Presiden Joko Widodo berdampak signifikan pada aktivitas revaluasi pada emiten di Bursa Efek Indonesia. Pengujian dapat dilakukan dengan menggunakan uji beda terkait apakah status perusahaan yang melakukan dan tidak melakukan revaluasi aset adalah sama. Kajian dapat dilakukan berdasarkan sektor industri untuk mendapatkan bukti yang lebih terinci terkait revaluasi aset.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andison, A., & Nasser, E. M. (2017). Operating Cash Flow, Earning Response Coefficient, and Fixed Asset Revaluation: Study on Manufacturing Company. *Etikonomi*, 16(1), 93–102. <https://doi.org/10.15408/etk.v16i1.482>
- Andrew, A., & Pitt, M. (2006). Changes in asset valuation in the UK health service. *Facilities*, 24(1/2), 43–60. <https://doi.org/10.1108/02632770610639198>
- Baek, H. Y., & Lee, D. Y. (2016). Motives for and Effects of Asset Revaluation: An Examination of South Korean Data. *Emerging Markets Finance and Trade*, 52(12), 2808–2817. <https://doi.org/10.1080/1540496X.2016.1209360>
- Bawono, I. R., & Singgih, E. M. (2010). Faktor-Faktor dalam Diri Auditor dan Kualitas Audit, Studi pada KAP “Big Four” di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia.*, 1–20.
- Brown, G. W., & Cliff, M. T. (2005). Investor Sentiment and Asset Valuation. *The Journal of Business*, 78(2), 405–440. <https://doi.org/10.1086/427633>
- Brown, P., Izan, H. Y., & Loh, A. L. (1992). Fixed Asset Revaluations and Managerial Incentives. *Abacus*, 28(1), 36–57. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6281.1992.tb00268.x>
- Cheng, C. S. A., & Lin, S. W. J. (2009). When do firms revalue their assets upwards? Evidence from the UK. *International Journal of Accounting and Information Management*, 17(2), 166–188.
- Cotter, J., & Richardson, S. (2002). Reliability of Asset Revaluations: The Impact of Appraiser Independence. *Review of Accounting Studies*, 7(4), 435–457. <https://doi.org/10.1023/A:1020763612369>
- Demski, J. S., Lin, H., & Sappington, D. E. M. (2008). Asset revaluation regulation with multiple information sources. *Accounting Review*, 83(4), 869–891. <https://doi.org/10.2308/accr.2008.83.4.869>
- Dillon, G. J. (1979). Corporate Asset Revaluations: 1925-1934. *Accounting Historians*

- Journal: Spring 1979*, 6(1), 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.2308/0148-4184.6.1.1>
- Dimitropoulos, P. E., Asteriou, D., Kousenidis, D., & Leventis, S. (2013). The impact of *IFRS* on accounting quality: Evidence from Greece. *Advances in Accounting*, 29(1), 108–123. <https://doi.org/10.1016/j.adiac.2013.03.004>
- Goodwin, J., Sawyer, K. R., & Ahmed, K. (2005). Value Relevance And Information Heterogeneity. *Pacific Accounting Review*, 17(2), 4–33.
- Hanlon, D., Navissi, F., & Soepriyanto, G. (2014). The value relevance of deferred tax attributed to asset revaluations. *Journal of Contemporary Accounting and Economics*, 10(2), 87–99. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2014.03.001>
- Haverty, J. L. (2006). Are *IFRS* and U.S. GAAP converging? Some evidence from People's Republic of China companies listed on the New York Stock Exchange. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 15(1), 48–71. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.intaCCAudtax.2006.01.004>
- He, Z., & Xiong, W. (2012). Debt financing in asset markets. *American Economic Review, American Economic Association*, 102(3), 88–94. <https://doi.org/10.1257/aer.102.3.88>
- Herrmann, D., Saudagaran, S. M., & Thomas, W. B. (2006). The quality of fair value measures for property, plant, and equipment. *Accounting Forum*, 30(1), 43–59. <https://doi.org/10.1016/j.accfor.2005.09.001>
- Hu, F., Percy, M., & Yao, D. (2015). Asset revaluations and earnings management: Evidence from Australian companies. *Corporate Ownership and Control*, 13(1CONT11), 1287–1296.
- Iatridis, G. E., & Kilirgiotis, G. (2012). Incentives for fixed asset revaluations: the UK evidence. *Journal of Applied Accounting Research*, 13(1), 5–20. <https://doi.org/10.1108/09675421211231871>
- Lin, Y. C., & Peasnell, K. V. (2000). Asset revaluation and current cost accounting: UK corporate disclosure decisions in 1983. *British Accounting Review*, 32(2), 161–187. <https://doi.org/10.1006/bare.2000.0128>
- Liu, C. (2011). *IFRS* and US-GAAP comparability before release No. 33-8879: Some evidence from US-listed Chinese companies. *International Journal of Accounting and Information Management*, 19(33), 24–33. <https://doi.org/10.1108/18347641111105917>
- Lopes, A. B., & Walker, M. (2012). Asset revaluations, future firm performance and firm-level corporate governance arrangements: New evidence from Brazil.

- British Accounting Review*, 44(2), 53–67.  
<https://doi.org/10.1016/j.bar.2012.03.007>
- Matthews, R. L. (1968). Income, Price Changes and the Valuation Controversy in Accounting. *Accounting Review*, 43(3), 509–516.
- Missonier-Piera, F. (2007). Motives for fixed-asset revaluation: An empirical analysis with Swiss data. *The International Journal of Accounting*, 42(2), 186–205.
- Mura, A., Piras, F., & Valentinčič, A. (2015). Do asset revaluations signal future performance of private firms? *39th EAA Annual Conference*.
- Nadeak, E. (2011). *Pengaruh Revaluasi Aktiva Tetap terhadap Penghematan Pajak pada PT. Kabelindo Murni*. Universitas Gunadarma.
- Putra, T. M. (2013). Analisis penerapan akuntansi aset tetap pada CV. Kombos Manado. *Journal of EMBA*, 2(4), 190–198.  
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Rupić, B., & Bonić, L. (2015). Fair Value Concept Specifics in Financial Reporting and Auditing. *Economic Themes*, 53(1), 119–141.
- Saito, S. (1983). Asset Revaluation and Cost Basis: Capital Revaluation in Corporate Financial Reports. *The Accounting Historians Journal*, 10(1), 1–23.
- Santoso, U. (2012). Pengaruh Pengungkapan Akuntansi, Akuntansi Konservatif, Komite Audit dan Kualitas Auditor Eksternal Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Akuntansi*, 16(1), 1–21.
- Shin, G. H., & Willis, V. F. (2014). Asset Revaluations Under International Accounting Standard 16: Evidence From Korea. *International Journal of Business, Accounting, & Finance*, 8(2), 21–36.
- Sloan, R. G. (1996). Do Stock Prices Fully Reflect Information in Accruals and Cash Flows about Future Earnings? *The Accounting Review*, 71(3), 289–315.  
<https://doi.org/10.2307/248290>
- Tay, I. (2009). *Fixed Asset Revaluation: Management Incentives and Market Reactions*. Lincoln University, New Zealand.
- Wali, S. (University O. S. (2015). Mechanisms of corporate governance and fixed asset revaluation. *International Journal Accounting and Finance*, 5(1), 82–97.
- Yao, D. F. T., Percy, M., & Hu, F. (2015). Fair value accounting for non-current assets and audit fees: Evidence from Australian companies. *Journal of Contemporary Accounting and Economics*, 11(1), 31–45.  
<https://doi.org/10.1016/j.jcae.2014.12.003>

## LAMPIRAN

**Tabel 2**  
**Ringkasan Hasil Penelitian atas Revaluasi Berdasarkan Tahun Penyajian, Kualifikasi KAP,**  
**dan Mata Uang Fungsional**

| Tahun         | Satuan Moneter | Kap      | Revaluasi Aset    |                  | Jumlah           |
|---------------|----------------|----------|-------------------|------------------|------------------|
|               |                |          | Tidak             | Ya               |                  |
| 2012          | USD            | Non Big4 | 11 (39,35%)       |                  | 11 (39,95%)      |
|               |                | Big4     | 15 (53,6%)        | 2 (7,1%)         | 17 (60,75%)      |
|               |                | Total    | 26 (92,95)        | 2 (7,15%)        | 28 (100%)        |
|               | IDR            | Non Big4 | 57 (55,95)        | 4 (3,95%)        | 61 (59,85)       |
|               |                | Big4     | 39 (38,2%)        | 2 (2,0%)         | 41(40,2%)        |
|               |                | Total    | 96 (94,1%)        | 6 (5,9%)         | 102 (100%)       |
| 2013          | USD            | Non Big4 | 15 (38,5%)        | 1 (2,6%)         | 16 (41,0%)       |
|               |                | Big4     | 21 (53,8%)        | 2 (5,1%)         | 23 (59%)         |
|               |                | Total    | 36 (92,3%)        | 3 (7,7%)         | 39 (100%)        |
|               | IDR            | Non Big4 | 59 (49,6%)        | 8 (6,7%)         | 67 (56,3%)       |
|               |                | Big4     | 50 (42,0%)        | 2 (1,7%)         | 52 (43,7%)       |
|               |                | Total    | 109 (91,6%)       | 10 (8,4%)        | 119 (100%)       |
| 2014          | USD            | Non Big4 | 15 (42,9%)        | 1 (2,9%)         | 16 (45,7%)       |
|               |                | Big4     | 17 (48,6%)        | 2 (5,7%)         | 19 (54,3%)       |
|               |                | Total    | 32 (91,4%)        | 3 (8,6%)         | 35 (100%)        |
|               | IDR            | Non Big4 | 63 (56,8%)        | 4 (93,6%)        | 67 (60,4%)       |
|               |                | Big4     | 41 (36,9%)        | 3 (2,7%)         | 44 (39,6%)       |
|               |                | Total    | 104(93,7%)        | 7(6,3%)          | 111(100%)        |
| Seluruh       | USD            | Non Big4 | 41(40,2%)         | 2(2,0%)          | 43(42,2%)        |
|               |                | Big4     | 53(52,0%)         | 6(5,9%)          | 59(57,8%)        |
|               |                | Total    | 94(92,2%)         | 8(7,8%)          | 102(100%)        |
|               | IDR            | Non Big4 | 179(53,9%)        | 16(4,8%)         | 195(58,7%)       |
|               |                | Big4     | 130(39,2%)        | 7(2,1%)          | 137(41,3%)       |
|               |                | Total    | 309(93,1%)        | 23(6,9%)         | 332(100%)        |
| <b>Jumlah</b> |                |          | <b>403(92,9%)</b> | <b>31 (7,1%)</b> | <b>434(100%)</b> |